



DJSPSK
DIREKTORAT PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PROFESI KEUANGAN

Direktorat Pembinaan dan
Pengawasan Profesi Keuangan

**#Kupas
Kamis**

Pokok Perubahan

PMK | Nomor 55
Tahun 2026

tentang

Konsultan Pajak dan Pihak Lain
yang Bertindak sebagai Kuasa
Wajib Pajak



Profesional, Akuntabel,
Sinergis, Transparan dan Inovatif

pppk.kemenkeu.go.id



Cakupan Pengaturan

Aturan Sebelumnya
PMK 111 Tahun 2014 jo. PMK 175
Tahun 2022

Pengaturan berfokus pada
Konsultan Pajak.



Aturan Baru
PMK 55 Tahun 2026

Mengatur:

- Konsultan Pajak
- Kantor Konsultan Pajak
- Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

PMK 55 menyebutkan ketiga pihak tersebut dalam ruang lingkup pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan Menteri.





Kompetensi

Aturan Sebelumnya PMK 111 Tahun 2014 jo. PMK 175 Tahun 2022

Kompetensi Konsultan Pajak
dibuktikan dengan Sertifikat
Konsultan Pajak Tingkat A, B,
dan C.

Sertifikat diperoleh melalui
mekanisme Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak (USKP).

Aturan Baru PMK 55 Tahun 2026

Pemenuhan kompetensi kuasa
di bidang perpajakan
dibuktikan melalui Surat
Keterangan Kompetensi (SKK)
yang diperoleh setelah lulus Uji
Kompetensi.

SKK terdiri atas 3 tingkat, yaitu
A, B, dan C, yang berlaku
selama 3 tahun.





Persyaratan menjadi Konsultan Pajak

Aturan Sebelumnya

PMK 111 Tahun 2014 jo. PMK 175 Tahun 2022

Untuk menjadi Konsultan Pajak, seseorang antara lain harus:

- memiliki Sertifikat Konsultan Pajak
- memenuhi persyaratan tertentu
- memiliki NPWP dan
- menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak.



Aturan Baru

PMK 55 Tahun 2026

Untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak, seseorang antara lain harus:

- memiliki kompetensi di bidang perpajakan (dibuktikan dengan SKK)
- lulus ujian profesi Konsultan Pajak
- minimal berpendidikan S1 atau setara
- memiliki pengalaman kerja sesuai klasifikasi
- memenuhi persyaratan integritas dan rekam jejak.





Pengaturan Kantor Konsultan Pajak

Aturan Sebelumnya PMK 111 Tahun 2014 jo. PMK 175 Tahun 2022

Belum ada pengaturan mengenai Kantor Konsultan Pajak.

Aturan Baru PMK 55 Tahun 2026

Konsultan Pajak kini dapat mendirikan Kantor Konsultan Pajak dengan beberapa pengaturan sebagai berikut:

- bentuk dan struktur kantor
- persyaratan pendirian dan izin kantor
- perubahan alamat, kepengurusan, dan sistem pengendalian mutu
- ketentuan penutupan kantor.



Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Konsultan Pajak

ATURAN SEBELUMNYA

PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022

Tingkat	Jumlah SKP per tahun	SKP terstruktur (minimal)
A	20	16
B	30	24
C	40	32



PPL wajib diikuti mulai Januari
tahun berikutnya setelah izin
diterbitkan.
Laporan realisasi PPL
sudah menjadi kewajiban.

ATURAN BARU

PMK 55 TAHUN 2026

Tingkat	Jumlah SKP per tahun	SKP terstruktur (minimal)
A	20	16
B	30	24
C	45	36



PPL wajib diikuti mulai Januari
tahun berikutnya setelah izin
diterbitkan (tetap).



Laporan realisasi PPL kini
disampaikan secara **elektronik**
paling lambat **31 Januari**
tahun berikutnya.





Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak

Aturan Sebelumnya PMK 111 Tahun 2014 jo. PMK 175 Tahun 2022

Belum ada pengaturan mengenai pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

Aturan Baru PMK 55 Tahun 2026

Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak:

- wajib memiliki SKK
- terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- memberikan jasa sesuai klasifikasi SKT
- termasuk dalam pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.





Bagaimana dengan yang sudah berjalan?



Izin Praktik Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022 tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak



Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan aturan sebelumnya masih dilaksanakan sampai 31 Desember 2026.



Sertifikat Konsultan Pajak yang telah diterbitkan dapat tetap berlaku sebagai SKK paling lama 2 tahun sejak diterbitkan, sesuai ketentuan peralihan.





Penguatan Ekosistem Tax Intermediaries yang Profesional dan Terpercaya

PMK Nomor 55 Tahun 2026 menjadi langkah maju untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih kredibel, melalui Tax Intermediaries yang profesional dan terpercaya, serta memiliki playing field yang setara.

Mau tahu lebih lebih lanjut mengenai pengaturan Konsultan Pajak dan Pihak Lain dalam PMK Nomor 55 Tahun 2026?

Ikuti terus rangkaian Kupas Kamis bulan ini!





DPPPK berkomitmen

Membangun zona integritas,
menghadirkan layanan berkualitas, bebas
dari korupsi, dan mewujudkan birokrasi
yang bersih melayani.

Layanan Informasi



pppk.kemenkeu.go.id



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



134



+62 813 1000 4134



@pppk_kemenkeu